

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Dengan diberikannya kewenangan dan keleluasaan pada Pemerintah Daerah pada era otonomi ini untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan di daerah, maka daerah otonomi memiliki kewajiban untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk pembangunan daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya yang tentu saja dengan didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah serta antara provinsi dengan kabupaten.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil dari perusahaan daerah (BUMD), dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang lain. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah di era otonomi ini.

Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang merupakan pengelola kekayaan yang dipisahkan, berwenang, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan, operasional dan administrasinya. Sehingga perusahaan milik daerah merupakan bagian yang cukup penting dalam menunjang PAD, namun dalam kenyataannya sumbangan laba dari perusahaan daerah terhadap PAD masih relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah, bahkan beberapa perusahaan daerah bahkan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah (Devas, 1999 :92).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyediakan air bersih PDAM masih mengalami banyak kendala yang sangat kompleks. Mulai dari kelembagaan, teknologi, anggaran, pencemaran, maupun sikap dari masyarakat. Pengelolaan air bersih berpacu dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PERPAMSI, permasalahan umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan yang masih rendah
2. Tingkat kehilangan air yang tinggi
3. Tingkat penagihan utang yang rendah
4. Komponen biaya produksi yang tinggi
5. Tarif yang belum menutupi biaya produksi

6. Tingkat hutang yang tinggi
7. In efisiensi pada tenaga kerja
8. Kebijakan yang kurang terarah
9. Tingginya campur tangan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan.

Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masalah yang dihadapi oleh PDAM berasal dari masalah manajemen dan operasional perusahaan, sedangkan masalah lain adalah hutang yang cukup besar. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan adanya usaha penyehatan yang bersifat penyehatan secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena jika perbaikan dilakukan hanya secara parsial saja akan memberikan dampak yang kurang signifikan pada tingkat kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan masalah yang dialami oleh PDAM berdampak pada upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat masih terlihat kurang, bahkan persentase penduduk yang terlayani terlihat makin menurun hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan cakupan pelayanan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terutama meliputi bidang manajemen keuangan, operasinal dan administrasi (www.perpamsi.org)

Salah satu perusahaan daerah yang perlu dinilai kinerjanya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor : 690.900-327 Tahun 1994

Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum adalah memenuhi pelayanan dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, serta sebagai salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu maka penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum harus berdasarkan prinsip-prinsip dan azas perusahaan yang sehat.

Penilaian kinerja terhadap Perusahaan Daerah Air Minum sangat menarik untuk dinilai kinerjanya, karena PDAM memiliki dua tujuan yang saling bertolak belakang yaitu : fungsi SOSIAL dengan memberikan pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat, serta fungsi PROFIT yaitu mencari keuntungan sebagai salah satu sumber PAD. Sehingga organisasi seperti ini sulit untuk dievaluasi kinerjanya secara keseluruhan (Mansoer, 1992 :91).

Dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola secara professional maka diharapkan agar BUMD memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber PAD, karena tanpa adanya pengelolaan secara profesional kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif sangat kecil, bahkan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah (Devas dkk :112-113)

Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim adalah salah satu badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, SUMSEL yang bergerak dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat selain itu PDAM Lematang Enim juga diharapkan dapat memenuhi fungsi profit atau ekonomi yaitu menghasilkan keuntungan sebagai salah satu sumber PAD bagi kabupaten Muara Enim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka demi terarahnya penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

Bagaimanakah Tingkat Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM pada periode tahun 2001-2005.

C. Batasan masalah

1. Penilaian tingkat kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dilakukan berdasarkan analisis tingkat kinerja berdasarkan Kepmendagri No 47 Tahun 1999 Tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum
2. Data yang diteliti adalah laporan akhir Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2001-2005.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perkembangan tingkat kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemkab Muara Enim dan PDAM Lematang Enim

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Muara Enim untuk mengetahui kinerja PDAM Lematang Enim yang telah berhasil dicapai dan melihat indikator apa sajakah yang perlu diperbaiki/ditingkatkan serta menetapkan target yang harus dicapai dimasa mendatang.
2. Sebagai bahan masukan atau dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan lebih lanjut PDAM Lematang Enim di masa mendatang

b. Bagi Penulis Sendiri

Menambah pengetahuan penulis tentang hal yang telah diteliti sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja nantinya